

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan agar dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang terlibat langsung atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Suatu anggaran yang efektif membutuhkan kemampuan dalam memprediksi masa depan yang meliputi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu anggaran sangat dibutuhkan mencapai tujuan organisasi yang berperan sebagai perencanaan dan pengendalian, termasuk organisasi sektor publik.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Variabel kejelasan sasaran diukur dengan tujuh indikator yang diperlukan yaitu tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, koordinasi.

Penekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sanksi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. Variabel Pengukuran untuk penekanan anggaran diukur dengan enam indikator yaitu anggaran merupakan alat pengendali kinerja, anggaran sebagai

tolak ukur kinerja, anggaran menuntut kinerja guna mencapai target, anggaran sebagai peningkatan kinerja, pemberian penghargaan untuk keberhasilan mencapai target, dan kompensasi ketika mencapai target (Widiya, 2017).

Partisipasi anggaran merupakan proses penyusunan anggaran dengan melibatkan kontribusi yang tinggi para manajer dalam melakukan penyusunan anggaran. Perilaku tersebut didasarkan pada teori agensi yang menjelaskan fenomena apabila pemilik mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk bertanggung jawab melakukan tugas dan membuat keputusan. Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat bawah atau menengah dalam penyusunan anggaran adalah timbulnya senjangan anggaran. Hal ini manajer yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang bias kepada pemilik, padahal manajer memiliki informasi yang dapat digunakan untuk membantu keakuratan anggaran perusahaan. Manajer meniggikan pengeluaran atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. Tingginya keterlibatan manajer dalam melakukan penyusunan anggaran akan memicu manajer melakukan tindakan yang ingin dicapai dengan menciptakan senjangan anggaran (Maria, 2018).

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi bisa timbul disebabkan oleh individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi. Yang meliputi dukungan moral, menerima nilai yang ada dalam organisasi, serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan kepada organisasi.

Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap, yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi.

Pada instalasi pemerintah daerah proses penyusunan anggaran dimulai dari tahap persiapan yaitu tahapan untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu memastikan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tahapan selanjutnya adalah tahap ratifikasi yaitu tahapan yang melibatkan proses politik. Pemimpin eksekutif harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak legislative terkait dengan anggaran yang disusun. Anggaran yang telah disusun secara logis dan sesuai akan dijadikan pedoman oleh eksekutif didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tahapan terakhir yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran adalah tahap pelaporan yaitu tahap dimana anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2005, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah metidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Fenomena senjangan anggaran terjadi pada realisasi anggaran Kabupaten Pati tahun 2017-2019 yang tidak sesuai dengan target yang dianggarkan, berikut tabel realisasi anggaran Kabupaten Pati

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2017

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	(%)
2017	2.712.776.398.000.00	2.769.242.943.472.00	102,08
Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)
2017	2.297.162.479.000.00	2.071.726.133.897.00	90,19

Sumber: pati.go.id

Berdasarkan table diatas dapat mencerminkan adanya senjangan anggaran perbedaan antara anggaran dengan realisasinya baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2017 menghasilkan selisih yang besar, hal tersebut menggambarkan adanya perilaku tidak produktif dari partisipan dimana saat penyusunan anggaran partisipan akan membuat target anggaran yang lebih rendah pada pendapatan dan mengajukan biaya lebih, hal ini dilakukan untuk mempermudah target anggaran dimana tindakan tersebut ini akan mengakibatkan adanya senjangan anggaran.

Selanjutnya fenomena terjadi pada tahun anggaran 2018 seperti yang dilansirkan dalam pasfimpati.com (31/01/2019) – Tingkat penyerapan APBD Kabupaten Pati oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berkisar antara 52%. Namun, laporan progres penyerapan tersebut, sebagian masih ada yang masih dalam proses. APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2018, mencapai total Rp.2,7 triliun lebih. Dari total itu penyerapan anggaran untuk pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dibawah yang ditargetkan, hal ini tentunya menimbulkan senjangan anggaran yang cukup tinggi (Pambudi dalam pamfimpati.com).

Fenomena berikutnya dikutip dari jateng.tribunnews.com (19/08/2019) – Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, belanja daerah direncanakan sebesar RP 3,06 triliun. Dibanding alokasi belanja APBD murni Tahun Anggaran 2019, jumlah ini meningkat sebesar Rp 238,25 miliar atau 8,43 %, rencana belanja tidak langsung perubahan anggaran bertambah sebesar Rp 53.573.358.000, meningkat 2,85 persen dibanding sebelum perubahan, peningkatan belanja tidak langsung tersebut karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati.

Sedangkan belanja langsung pada anggaran perubahan bertambah Rp 184.676.890.000, meningkat 19,50 persen dibandingkan APBD murni 2019. Penambahan itu digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 (Mazka Hauzan Naufal dalam jateng.tribunnews.com).

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara dana yang dianggarkan dengan realisasi anggaran menimbulkan senjangan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat sehingga dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah akan berbeda realisasinya saat kebijakan pemerintah pusat berganti.

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Sutanaya dan Maria (2018) menyatakan partisipasi anggaran, penekanan anggaran, rencana kompensasi semua berpengaruh positif terhadap selisihan anggaran. Manusabha dan Made (2019) menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan penekanan anggaran berpengaruh negatif. Tegar(2017) menyatakan partisipasi anggaran, asimetri informasi, tekanan anggaran, komitmen organisasi semua berpengaruh negatif terhadap selisihan anggaran. Widiya (2017) menyatakan kejelasan sasaran anggaran dan penekanan anggaran berpengaruh negatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Widiya (2017) yang berjudul kejelasan sasaran anggaran dan penekanan anggaran pada selisihan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Widiya (2017) adalah pada penelitian Widiya (2017) hanya menggunakan tiga variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran, penekanan anggaran dan komitmen organisasi. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu partisipasi anggaran. Alasan penambahan variabel ini diantaranya; 1. Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap selisihan anggaran karena Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih pihak, yang membawa efek di masa mendatang bagi mereka yang membuat atau mengambil suatu keputusan. Anggaran yang partisipatif menggambarkan keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan suatu anggaran. Keikutsertaan tersebut merupakan pendekatan yang efektif untuk perbaikan motivasi perilaku individu dalam suatu organisasi,

karnanya partisipasi ini mendorong manajer berusaha lebih aktif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan studi empiris. Penelitian Widiya. (2017) studi empiris yang digunakan yaitu kota Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini studi empiris pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian melakukan peneliti dengan mengambil judul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penekanan Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati).**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal judul penelitian ini dan terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut ini :

1. Variabel dependen : Senjangan anggaran
2. Variabel moderasi : Komitmen organisasi
3. Variabel independen : Kejelasan sasaran anggaran, penekanan anggaran, dan partisipasi anggaran.
4. Obyek penelitian : Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran?
2. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran?
4. Apakah ada pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran jika dimoderasi oleh komitmen organisasi ?
5. Apakah ada pengaruh penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran jika dimoderasi oleh komitmen organisasi?
6. Apakah ada pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran jika dimoderasi oleh komitmen organisasi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran.
2. Pengaruh penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.
3. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
4. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.
5. Pengaruh penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

6. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi ataupun bahan perbandingan bagi riset-riset bahan referensi ataupun bahan perbandingan bagi riset-riset selanjutnya terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi ataupun referensi dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penekanan anggaran dan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran sehingga tujuan pemerintah tercapai.

- b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan dapat menambah literature perpustakaan sehingga dapat memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

c. Bagi masyarakat

Sebuah sarana informasi dan pengetahuan mengenai komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penekanan anggaran dan partisipasi anggar terhadap senjangan anggaran.

